



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE 2022 - 2026



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ASAHAN**



**ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ASAHANTAHUN 2022-2026**

Tim Penyusun



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	: Assoc Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn
Ketua	: Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H
Sekretaris	: Emiel Salim Siregar, S.H., M.H
Anggota Tim Penyusun	: 1. Dany Try Hutama Hutabarat, S.H., M.H 2. Rima Arianti Sinurat, S.H 3. Miftahul Husna, S.H



KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, karunia dan Inayah-Nya sehingga penyusunan Buku Panduan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022-2026 dapat di selesaikan dengan baik. Buku Panduan memuat Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022-2026 yang disusun berdasarkan kebutuhan Fakultas Hukum Universitas Asahan. Melalui buku ini diharapkan dosen-dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Asahan dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah dan diharapkan menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas, efektivitas dan efesensi bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Asahan Tahun 2022. Kami mengajak kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk menjadikan buku ini sebagai pedoman untuk penyusunan usulan penelitian.

Terbitnya buku pedoman ini tentunya tidak lepas dari adanya dukungan dan bantuan antara lain Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Asahan, LPPM Universitas Asahan, Para Reviewer Fakultas Hukum Universitas Asahan, dan para pegawai Fakultas Hukum Universitas Asahan serta semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per-satu. Untuk itu, kepada semua yang telah berkontribusi kami ucapkan terima kasih.

Kami berharap dengan kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua.

Kisaran, 29 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum UNA,



Assoc Prof. Dr. Bahmid, S.H., M.Kn



DAFTAR ISI

Cover	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022-2026	
1	
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	3
1. Pengertian Road Map	3
2. Tujuan dan Sasaran Roadmap Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Untuk Ilmu Hukum.....	4
C. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022 – 2026.....	5
D. Penutup	8
Lampiran	10
A. Pohon Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan	11
B. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Berdasarkan Departemen Tahun 2022-2026.....	12
C. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Berdasarkan Tema Unggulan Tahun 2022-2026	19



Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022-2026.

A. Pendahuluan

Program Studi Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan Ilmu Hukum. Program Studi Ilmu Hukum harus mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sumbangsih terhadap pembangunan melalui pengembangan penelitian ilmu hukum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat terhadap pembangunan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mewujudkan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri khas sebuah perguruan tinggi.

Universitas Asahan (UNA) merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan riset yang berdasar pada *roadmap* berbasis Hukum Lingkungan, pengembangan riset yang dapat menjadi kiblat nasional, pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen, serta memperluas kontribusi UNA terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Riset yang dihasilkan diharapkan merupakan hasil-hasil riset berkualitas tinggi berdasarkan standar nasional maupun internasional, serta dapat memacu peneliti untuk lebih produktif, meningkatkan kualitas penelitiannya dan membangun program riset Kelompok Keahlian dan Puslitbang (pusat penelitian dan pengembangan). Program Riset UNA ini sejalan dengan tujuan pengembangan riset UNA yang tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) UNA periode 2020- 2025 dan Rancangan Pengembangan Jangka Panjang UNA 2030.

Kebijakan tentang Bidang Unggulan Universitas Asahan yang ditetapkan adalah merupakan Roadmap penelitian Universitas Asahan yang meliputi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

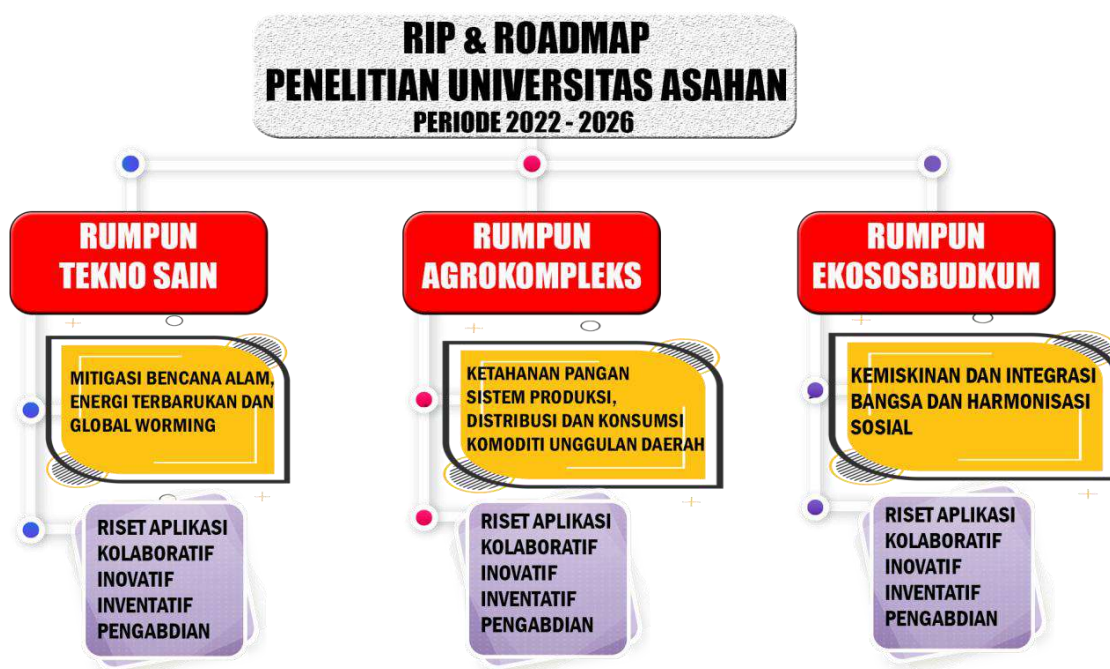
1. Roadmap Program Studi yang berasal seluruh Fakultas di lingkungan Universitas

Asahan;

2. Roadmap program Pusat Penelitian dan Pengembangan LPPM; dan
3. Roadmap Universitas Asahan berasal dari empat kelompok Rumpun bidang ilmu, yaitu:
 - a. Rumpun Tekno-Sain;
 - b. Rumpun Agrokompleks; dan
 - c. Rumpun Ekososbudkum (Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora). Pengelompokan penelitian ke dalam ilmu-ilmu serumpun ini dimaksudkan untuk memudahkan membuat suatu kebijakan dan prioritas penelitian yang dapat didukung secaramultidisiplin.

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan merupakan salah satu dari tiga kelompok rumpun bidang Ilmu, yakni dalam Rumpun Esososbudkum (Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora) dengan Bidang fokus fakultas Hukum, yaitu:

Pengembangan konsepsi hukum lingkungan dalam kerangka penguatan substansi, pemberdayaan kelembagaan, dan penegakan hukumnya.



Pedoman Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat oleh LPPM UNA disusun untuk menjadi acuan memenuhi kualitas riset sejalan dengan tujuan pengembangan riset UNA yang tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) UNA periode 2020-2025 dan Rancangan Pengembangan Jangka Panjang UNA 2030, sebagaimana yang diharapkan dalam Sistem

Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) oleh Dirjen pengembangan riset pada Kementerian Ristek Dikti. Adapaun tema penelitian UNA dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan pangan, pengembangan biomaterial dan pengembangan kawasan pesisir.
2. Pengembangan kultur jaringan tanaman dan telemedisin berbasis teknologi Revolusi Industri 4.0.
3. Pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan, infrastruktur dan kebencanaan berbasis inovasi sains dan teknologi.
4. Pengembangan SDM, Pengentasan Kemiskinan, resolusi konflik, integrasi bangsa dan harmonisasi sosial pada daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) Berbasis Kearifan Lokal
5. Peningkatan studi manajemen keuangan.
6. Pengembangan pusat kajian keguruan dan peningkatan kualitas keahlian profesi guru.
7. Pengembangan padi, jagung, kopi, kakao, dan sagu unggul berbasis varietas lokal.

Sejalan dengan tema penelitian dan bidang fokus Humaniora tersebut di atas, maka Roadmap Penelitian Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan pada 3 (tiga) tema unggulan, yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Konflik dan Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial;
3. Membangun Insan dan Kelembagaan yang berbasis Kearifan Lokal.

B. Konsep Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengertian Roadmap

Secara umum roadmap didefinisikan sebagai bagan atau alur jalan yang ada (atau yang akan ada) dalam peta penelitian. Secara populer roadmap telah berubah menjadi kata kerja baru yang berisi uraian tentang proses perencanaan pengembangan. Roadmap merupakan sekumpulan uraian yang berisi tentang rencana, gagasan, sumberdaya, tujuan dan cara mencapai tujuan dari suatu produk, subjek kajian atau proyek. Roadmap telah menjadi suatu rumusan konsep yang berisi tentang pandangan yang luas tentang masa depan suatu bidang tertentu atau bidang yang dipilih yang disusun berdasarkan atas pengetahuan bersama (*collective knowledge*) dan merupakan imajinasi masa depan yang dirumuskan oleh sekumpulan orang cerdas pengendali pembaharuan dalam suatu bidang tertentu (Arryanto *et.al.* 2006).

Fungsi utama dari roadmap menurut Garcia dan Bray (1998 *dalam* Arryanto *et.al.*

2006) adalah:

1. Merumuskan konsensus di antara para pengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan diperlukan dalam pengembangan di masa depan.
2. Digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengembangan masa depan.
3. Berisi kerangka kerja dalam rangka pengembangan dan koordinasi pada setiap tingkat pengambil keputusan.

Secara umum roadmap biasanya disajikan dalam bentuk gambar yang menghubungkan antara komponen sumber daya, rumusan, tujuan, cara pencapaian tujuan dan rencana waktu yang dibutuhkan. Bentuk umum roadmap tersusun atas empat lapisan, yaitu lapisan pertama yang berfungsi memberikan uraian tentang sumberdaya “*resources*” atau memberikan jawaban atas pertanyaan “*know-how*”. Lapisan kedua berisi informasi bagaimana cara menghantarkan “*delivery*” lapisan pertama untuk mencapai tujuan “*know-what*”. Lapisan ketiga berisi tujuan “*purposes*” “*know-why*” yang berisi informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, situasi lingkungan, industri, busines, kecenderungan, pengendali, ancaman, tujuan, tonggak sejarah dan strategi sebagai tujuan dari perencanaan. Lapisan keempat berisi uraian tentang bilamana atau kapan tujuan tercapai “*know-when*” merupakan tujuan dari perencanaan yang ditargetkan tercapai sebagai fungsi waktu.

Analisis pembuatan roadmap secara temporal biasanya berupa analisis retrospektif dan analisis prospektif. Hal ini juga biasa disebut sebagai “pendekatan mundur” dan “pendekatan maju” (EIRMA 1997 dalam Arryanto *et al.* 2006), atau juga disebut sebagai model “*top-down*” dan “*bottom-up*”. Analisis retrospektif adalah mencari bagaimana caranya mencapai target yang diberikan dan analisis prospektif menunjukkan proses pembangunan teknologi sampai munculnya target baru. Proses pembuatan roadmap yang lengkap umumnya didasarkan pada kombinasi kajian retrospektif dan kajian prospektif.

2. Tujuan dan Sasaran Roadmap Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Untuk Ilmu Hukum

Tujuan utama pembuatan konsep peta-jalan (*roadmap*) ini diharapkan dapat memudahkan para dosen dalam melakukan kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang salah satu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi serta dalam menyikapi perkembangan hukum nasional.

Adapun tujuan penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



Fakultas Hukum Universitas Asahan adalah:

1. Menentukan dan mengarahkan kegiatan penelitian dalam kurun waktu 5 tahun (2022-2026) yang akan dilakukan oleh peneliti (monodisiplin) dan atau kelompok peneliti baik secara multidisipliner atau intra/inter disiplin atau bermitra dengan perusahaan industri.
2. Merumuskan dan memetakan isu-isu strategis di bidang hukum, dan membagi cakupan penelitian sebagai kegiatan penelitian: Riset Dasar (R&D), Riset Terapan (teknologi), dan Riset Pengembangan (produk).
3. Merumuskan dan memberikan arahan penyusunan strategi dan implementasi pengembangan penelitian di lingkungan Fakultas Hukum UNA.
4. Mendorong peningkatan konsensus seluruh sivitas akademika dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menunjang pencapaian visi dan misi institusi melalui kegiatan penelitian.

Sasaran penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum UNA adalah:

1. Menjadikan penelitian sebagai iklim keseharian dalam kegiatan akademis.
2. Mendorong terlaksananya kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen.
3. Mendorong peningkatan publikasi ilmiah di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
4. Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu institusi penelitian yang produktif, progresif dan terpadang.
5. Menjadikan penelitian Program Studi Ilmu Hukum sebagai salah satu komponen penunjang tercapainya visi dan misi institusi.

C. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Tahun 2022 - 2026

Agenda roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum UNA Tahun 2022-2026 disesuaikan dengan Tema Unggulan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNA, yaitu (1) Pengentasan Kemiskinan; (2) Konflik dan Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial; dan (3) Membangun Insan dan Kelembagaan yang berbasis Kearifan Lokal. Dari ketiga tema unggulan UNA tersebut, maka disusunlah tema unggulan Fakultas Hukum UNA, yakni:

1. Kebijakan;
2. Implementasi/Penegakan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; dan



3. Identifikasi Hukum dan Gejala Sosial

Ketiga tema tersebut kemudian diimplementasikan oleh Program Studi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Asahan dan dituangkan dalam bentuk bidang riset, yakni:

1. Hukum Keperdataan, bidang risetnya adalah:

- a. Hukum Islam;
- b. Badan Usaha dan Badan Hukum
- c. Agraria
- d. HKI
- e. Hukum Kontrak dan Bisnis
- f. Hukum Keluarga dan Perwarisan
- g. Hukum Acara Perdata
- h. Hukum Pembiayaan Perbankan
- i. Pertanahan
- j. Hukum dagang
- k. Alternative Dispute Resolution (ADR)
- l. Investasi dan Pasar Modal
- m. Lingkungan
- n. Perancang Kontrak

2. Hukum Pidana, bidang risetnya adalah:

- a. Pidana Adat
- b. Perikanan
- c. Kesehatan
- d. Perlindungan Anak dan Perempuan
- e. Pidana Khusus
- f. Kriminologi
- g. Hukum Acara Pidana
- h. Pidana Pajak
- i. Perkebunan
- j. Pidana Lingkungan
- k. Korupsi
- l. Pidana Cyber
- m. Viktimologi
- n. HAM

3. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara bidang risetnya adalah:
 - a. Pemda/Pemdes
 - b. Agraria
 - c. Hukum Ketenagakerjaan
 - d. Perikanan
 - e. Kelembagaan Negara
 - f. HAM
 - g. Sengketa PEMILU
 - h. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Hukum Acara PTUN
 - j. Imigrasi
 - k. Pelayanan publik
 - l. Kebijakan
 - m. Perizinan
 - n. Pajak
4. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, bidang risetnya adalah:
 - a. Adat
 - b. HAM
 - c. Psikologi Hukum
 - d. Antropologi Hukum
 - e. Konstitusi
 - f. Negara Hukum dan Demokrasi
 - g. Pengantar Ilmu Hukum
 - h. Sosiologi Hukum

Dengan berdasar pada tema dan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum UNA sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bidang yang saling beririsan antar bidang riset sehingga dosen atau kelompok dosen dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan lintas bidang riset. Bahkan cara yang seperti ini diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan masing-masing sumber daya pada tiap-tiap bidang dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bidang riset diuraikan di atas kemudian diturunkan lagi dalam bentuk tema riset dan tema riset tersebut diturunkan dalam bentuk topik riset. Topik riset yang dimaksud ditentukan oleh

masing-masing dosen atau kelompok dosen dengan berdasar pada tema penelitian yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Tiap topik riset ditentukan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sehingga dapat diketahui apakah penelitian tersebut masuk dalam kategori penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian pengembangan. Ditentukan pula waktu pelaksanaan penelitiannya sehingga dari roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akhirnya dapat menuntun pada pencapaian visi dan misi fakultas.

Selengkapnya mengenai roadmap penelitian Fakultas Hukum Universitas Asahan dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Roadmap ini kemudian dituangkan dalam bentuk pohon penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan yang dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Penutup

Universitas Asahan (UNA) merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengalokasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung kegiatan riset yang berdasar pada *roadmap* berbasis Hukum Lingkungan, pengembangan riset yang dapat menjadi kiblat nasional, pengembangan kapasitas dan kompetensi dosen, serta memperluas kontribusi UNA terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan merupakan salah satu dari empat kelompok rumpun bidang Ilmu, yakni dalam Rumpun Esososbudkum (Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora) dengan Bidang Fokus Fakultas Hukum, yaitu **Pengembangan konsepsi hukum lingkungan dalam kerangka penguatan substansi, pemberdayaan kelembagaan, dan penegakan hukumnya.**

Sejalan dengan tema penelitian dan bidang fokus Humaniora, maka Roadmap Penelitian Prodi Ilmu Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Tahun 2022- 2026 disusun berdasarkan pada 3 (tiga) tema unggulan, yaitu:

1. Pengetasan Kemiskinan;
2. Konflik dan Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial;
3. Membangun Insan dan Kelembagaan yang berbasis Kearifan Lokal.

Ketiga tema tersebut kemudian diimplementasikan oleh departemen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Asahan dan dituangkan dalam bentuk bidang riset. Bidang riset diuraikan di atas kemudian diturunkan lagi dalam bentuk tema riset dan tema riset tersebut diturunkan dalam bentuk topik riset. Topik riset yang dimaksud ditentukan oleh masing-masing dosen atau kelompok dosen dengan berdasar pada tema penelitian yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Tiap topik riset ditentukan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sehingga



dapat diketahui apakah penelitian tersebut masuk dalam kategori penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian pengembangan. Ditentukan pula waktu pelaksanaan penelitiannya sehingga dari roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akhirnya dapat menuntun pada pencapaian visi dan misi fakultas.

Akhirnya, roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah disusun diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap dosen yang akan melakukan penelitian sehingga dapat menunjang pencapaian visi dan misi Fakultas Hukum.



LAMPIRAN

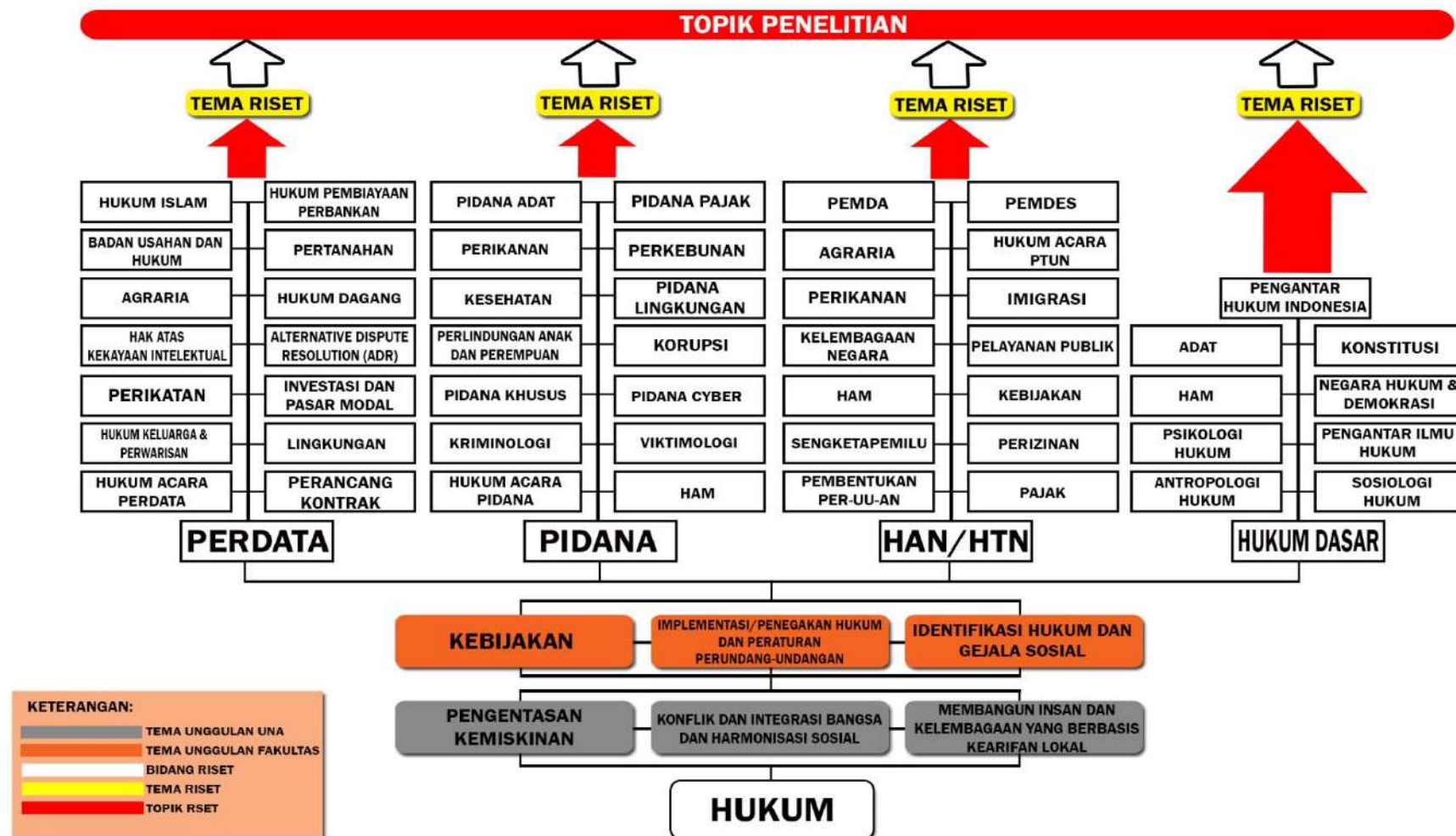
1. Pohon Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan
2. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Berdasarkan Rapat Senat Tahun 2022-2026
3. Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan Berdasarkan Tema Unggulan Tahun 2022-2026



Lampiran 1

Pohon Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Asahan

POHON PENELITIAN DAN ROAD MAP PENELITIAN



Lampiran 2

**Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas
Asahan Berdasarkan Rapat Senat Tahun 2022-2026**

1. Bidang Hukum Keperdataan

a. Hukum Perdata

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
1.	Pengetasan Kemiskinan	Hukum Islam dan Waris Islam	Perjanjian Kawin
			Perkawinan Campuran
			Poligami
			Hak Atas Warisan
		Hukum Kontrak Dan Bisnis	Perlindungan Konsumen
		HKI Hukum Dagang	Hak Tradisional Masyarakat Perlindungan Konsumen dan UMKM
		Hukum Acara Perdata	Litigasi Non Litigasi
2.	Konflik & Integrasi Bangsa	Hukum Islam dan Hukum Keluarga dan Pewarisan	Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Dalam Perkawinan
			Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Perdata
		Hukum Kontrak, Bisnis, Investasi dan Pasar Modal, Hukum Pembiayaan Perbankan, Pertanahan,	Aset Perusahaan
			Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
		HKI	Kepastian Usaha dan Persaingan Usaha
			SDA dan Indikasi Geografis Perlindungan HKI
		Alternative Dispute Resolution (ADR)	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi
3.	Membangun Insan dan Kelembagaan Yang Berbasis Kearifan Lokal	Hukum Kontrak Dan Bisnis Perancang Kontrak	Legal drafating
		HKI	Ekspresi Budaya Tradisional
		Lingkungan	Pemanfaatan lingkungan berbasis budaya

b. Perdata Internasional

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
1.	Pengentasan Kemiskinan	Badan Usaha dan Badan Hukum,	Badan Usaha Berbadan Hukum & Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
		Investasi dan Pasar Modal	Investasi



			Penanaman Modal
			Buruh & Pekerja Asing
2.	Konflik dan Integrasi Bangsa	Pertahanan & Keamanan	Peranan Indonesia dalam Mendukung Perdamaian
			Peran Organisasi Internasional dalam menciptakan kerjasama internasional
			Cyber Security
			Corruption & Asset Recovery
3.	Membangun Insan dan Kelembagaannya yang Berbasis Kearifan Lokal	Lingkungan	Perlindungan & Pencemaran Lingkungan
			Climate Changes

c. Bidang Agraria

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
	Pengetasan Kemiskinan	Hukum Agraria	Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
			Reforma Agraria (Asset dan Akses)
			Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi yang Layak
		Hukum Agraria dan Perikanan	Kemiskinan Nelayan dan Petani Ikan
			Jalur Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional
			Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi-Hasil Perikanan
			Illegal Fishing
			Penataan Permukiman Nelayan
		Hukum Lingkungan	Hak-Hak Masyarakat (MHA, Masy Adat, Masyarakat Tradisional, Masyarakat Lokal) terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
2.	Konflik & integrasi bangsa Membangun insan dan kelembagaan yang berbasis kearifan lokal	Hukum Agraria	Redefenisi Hak-Hak Atas Tanah (perkembangan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah & Pemanfaatan Ruang Udara/Angkasa)
			Konflik dan Sengketa Agraria
		Hukum Lingkungan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam berdasarkan Otonomi Daerah

2. Bidang Hukum Pidana

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
1.	Pengentasan Kemiskinan	Kriminologi viktimologi	Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Hidden Crimes
		Tindak Pidana Khusus	Tindak Pidana Perikanan
			Tindak Pidana Ekonomi
			Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
			Tindak Pidana Pencucian Uang
			Tindak Pidana Korupsi
		Penitensier	Restorative Justice
			Pidana dan Pemidanaan
			Penyelesaian sengketa
		Hukum Pidana Perlindungan Anak dan Perempuan	Diversi
			Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
			Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
			Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana
		Kesehatan	Legal forensik
2.	Konflik dan Integrasi Bangsa	Tindak Pidana Khusus	Tindak Pidana Keimigrasian
			Pelanggaran HAM Berat
			Tindak Pidana Terorisme
			Tindak Pidana Narkotika
			Tindak Pidana Perdagangan Orang
			Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
		Hukum Acara Pidana	Litigasi
			Non Litigasi
		Pidana Cyber	Kejahatan dibidang teknologi, cyber bullying, pencurian data, cyber terrorism, Hacking
3.	Membangun Insan dan Kelembagaannya yang Berbasis Kearifan Lokal	Hukum Pidana Adat	Delik Adat
			Sanksi Delik Adat
			Mekanisme Penyelesaian Delik Adat
		Hukum Pidana Perikanan	Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Laut
		Pidana Lingkungan	Illegal Logging, Perusakan Lingkungan, Pembuangan Limbah
		Hukum Acara Pidana	Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan

a. Pidana Internasional

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
1.	Pengentasan Kemiskinan	Lingkungan	Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir
		Hak Asasi Manusia	Pengaturan, Perlindungan & Penegakan HAM
		Pidana Pajak	Pemberantasan Kemiskinan
		Korupsi	Informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dalam laporan pajak & pemerasan atau pengancaman terhadap wajib pajak
			Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi, pencucian uang.
2.	Konflik dan Integrasi Bangsa	Perikanan	Penegakan Hukum & Keamanan di Laut
3.	Membangun Insan dan Kelembagaannya yang Berbasis Kearifan Lokal	Hak Asasi Manusia	<i>Indegenous People: Perlindungan Terhadap Suku Asli</i>
			<i>Trafficking</i>
		Lingkungan	Perlindungan & Pencemaran Lingkungan
		Perkebunan	Climate Changes
			Membuka atau mengelola lahan
			Kerusakan kebun atau aset lainnya

3. Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara

a. Hukum Tata Negara

No.	Tema Unggulan	Bidang Riset	Tema Riset
1.	Pengentasan Kemiskinan	Pemrintah daerah, Pemerintah Desa dan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah	Penataan Kewenangan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Daerah
		Pengangkatan Pejabat Daerah	Lelang Jabatan
2.	Konflik & integrasi bangsadan Harmonisasi Sosial	Konsep Penataan Lembaga Negara	Lembaga-lembaga Negara yang terkait secara langsung dalam pengembangan benua maritime
		Sengketa Pemilihan Umum	Konsep Sengketa Pemilu dan penyelesaiannya

3.	Membangun Insan dan Kelembagaanya yang Berbasis Kearifan Lokal	Konsep Pengelolaan kewenangan antara lembaga Negara dan daerah	Hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan Benua Maritim
		Konsep nilai maritim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan	Pembentukan Peraturan perundang-undangan berbasis benua maritim
		Hak Asasi Manusia	Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Di Daerah
		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Litigasi Non Litigasi

b. Bidang Hukum Administrasi Negara

No.	Tema Unggulan	Bidang Riset	Tema Riset
1.	Pengentasan Kemiskinan	Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
		Hukum Ketenagakerjaan	Penyelesaian Sengketa Pekerja dengan Pengusaha Hak-hak Buruh/Pekerja
2.	Konflik & integrasi bangsa dan Harmonisasi Sosial	Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas ASN
			Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan AAUPB di Lingkungan Pemerintah Kab. Asahan
			Tingkat Ketaatan Pejabat Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman
		Imigrasi	Pelayanan Pengurusan Izin Berangkat keluar Negeri
		Kebijakan	Kebijakan Hukum Administrasi Dalam Pengaturan Tata Ruang
		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Litigasi Non Litigasi
		Hukum Agraria	Redefenisi Hak-Hak Atas Tanah (perkembangan Pemanfaatan



			RuangBawah Tanah & Pemanfaatan Ruang Udara/Angkasa)
			Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat
			Reforma Agraria (Asset dan Akses)
			Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi yang Layak
		Hukum Perikanan	Penegakan Hukum & Keamanan di Laut
		Pembentukan Peraturan Perudnag-undangan	Konsep Nilai-Nilai Maritim dalam pembentukan perundang-undangan (HTN)
3.	Membangun Insan dan Kelembagaanya yang Berbasis Kearifan Lokal	Pelayanan Publik	Tingkat Kepatuhan Pejabat Terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur)
		Pajak	Pemenuhan Kewenangan, Kewajiban dan Ketaatan Larangan Pejabat Pajak
		Perizinan	Sengketa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan

4. Hukum Dasar

a. Bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan

No.	Tema Unggulan	Bidang Fokus Riset	Tema Riset
1	Pengentasan Kemiskinan	Penegakan Hukum	Sosiologi Hukum
			Psikologi Hukum
		Efektivitas Hukum	Sosiologi Hukum
			Psikologi Hukum
2	Konflik dan Integrasi Bangsa danHarmonisasi sosial	Penegakan Hukum	Sosiologi Hukum
			Psikologi Hukum
		Efektivitas Hukum	Sosiologi Hukum
			Psikologi Hukum
3.	Membangun Insan dan Kelembagaannya yang BerbasisKearifan Lokal	Efektivitas Hukum	Antropologi Hukum

b. Bidang Konstitusi dan Hukum Dasar

No	Tema Unggulan	Bidang Riset	Tema Riset
1	Pengentasan Kemiskinan	Negara Hukum dan Demokrasi	Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance
		Hak Asasi Manusia	Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Sumber Daya Alam
		Hukum Adat	Harta Kekayaan Adat dan Sistem Waris Adat
			Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Atas Tanah Adat
		Konstitusi	Sengketa Pemilu, undang-undang, Perda, Perbup, Perdes
2	Konflik dan Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial	Negara Hukum dan Demokrasi	Hukum sebagai Cermin Tatanan Sosial Masyarakat
		Hak Asasi Manusia	Hukum sebagai Suatu Sistem
		Pengantar Ilmu Hukum	Peristiwa dan perilaku hukum
3	Membangun Insan dan Kelembagaannya yang Berbasis Kearifan Lokal	Negara Hukum dan Demokrasi	Implementasi Prinsip-prinsip Musyawarah Mufakat Berbasis Kearifan Lokal
		Hak Asasi Manusia	Implementasi Jaminan Hak Asasi Manusia (pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan hidup)
		Hukum Adat	Pranata Hukum Adat dalam Masyarakat Indonesia yang bercorak pluralis
			Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai sumber hukum
			Peran dan fungsi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Delik Adat



Lampiran 3

**Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas
Asahan Berdasarkan Tema Unggulan Tahun 2022-2026**

No	TEMA UNGGULAN	PENGENTASAN KEMISKINAN	
	ISU STRATEGIS	BIDANG FOKUS RISET	TEMA RISET
	(1)	(2)	(3)
1	ISU STRATEGIS : HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK	Kebijakan hukum di bidang kesehatan menuju kesejahteraan social (Hk. Pidana)	Malpraktik Medis
			Aborsi
			Euthanasia
			Irformet Consent
			Visum et Repertum
		Hukum Acara Pidana	litigasi
			Non litigasi
		Kriminologi dan Viktimologi	Penanggulangan Kejahatan
		Tindak Pidana Khusus	Tindak Pidana Perikanan
			Tindak Pidana Ekonomi
			Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
			Tindak Pidana Perlindungan Konsumen
			Tindak Pidana Pencucian Uang
			Tindak Pidana Korupsi
		Kesehatan	Legal forensik
		Hukum Penitensiar	Restorative Justice
			Pidana dan Pemidanaan
			Hak-hak Narapidana
		Hukum Perlindungan Anak	Diversi
			Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana
			Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Tindak Pidana
			Perlindungan Hukum Anak sebagai Saksi Tindak Pidana
		Pidana Lingkungan	Perlindungan & Pencemaran Lingkungan
			Climate Changes
		Korupsi	Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi, pencucuisn uang.
		Hukum Kontrak dan Bisnis	Perlindungan Konsumen
			Hak Tradisional Masyarakat



		Alternative Dispute Resolution (ADR)	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi
		Hukum Orang, Keluarga & Waris (Hk. Perdata, Hk. Adat, Hk. Islam)	Perkawinan dan Perceraian
			Hak Waris
			Hak Anak
		Hak-Hak Atas Tanah	Hak Ulayat dan Tanah Adat
			Penggadaan Tanah
			Transaksi Tanah
			Hak Pengelolaan
		Hukum Agraria dan Perairan Pesisir	Kemiskinan Nelayan dan Petani Ikan
			Penataan Jalur Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tradisional
			Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan
			Bagi Hasil Perikanan
			Illegal fishing
			Penataan Permukiman Nelayan
		Badan Usaha dan Badan Hukum, (H.Dasar), (HAN), (HTN) dan Lingkungan	Badan Usaha Berbadan Hukum dengan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
			Corporate Social Responsibility (CSR) di sekitar areal Pertambangan
			Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA berdasar pada Otonomi Daerah
			Hukum sebagai Instrumen Perlindungan Sumber Daya Alam (Hukum Dasar)
		Hukum Perumahan dan Permukiman (Hk.Agr)	Perumahan yang layak huni bagi MBR(Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
			Konsep Hunian Berimbang
			Ruang Terbuka Hijau
		Kajian Hukum dan Demokrasi (H. Dasar)	Implementasi prinsip-prinsip GoodGovernance
		Kebijakan terkait Kepatuhan Wajib Pajak (HAN) & (Hk. Perdata), Perizinan	Kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan Hak dan Kewajiban (HAN)
			Perjanjian Nominee menghindari Pajak(Hk.Perdata)
		Hak Asasi Manusia (HI)	Pengaturan Perlindungan dan Penengakan HAM
			Pemberantasan Kemiskinan
		Pembangunan Berkelanjutan (HI), (Hukum Agraria),	Penatagunaan Tanah dalam Pembangunan Berkelanjutan
			Good Governance
		Ekonomi dan Perdagangan (HI)	Penanaman Modal
			Buruh dan Pekerja Asing
		Hukum dan Pembangunan	Sosialisasi Undang-Undang
			Kedasaran dan Ketaatan Hukum
			Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat



		Hukum Acara Perdata	Litigasi
			Non Litigasi
2	ISU STRATEGIS : KEBIJAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BANGSA, DAYA SAING BANGSA, PENCEGAHAN KONFLIK, PENATAAN LEMBAGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	Hukum Perikatan, pembiayaan perbankan, dan Investasi dan Pasar Modal	Aset Perusahaan
			Penanaman Modal (PMDN) dan (PMA)
			Kepastian Usaha dan Persaingan Usaha
			Aset Perusahaan
		HKI	SDA dan indikasi Geografis
			Perlindungan HKI
		Hukum Adat	Pembentukan Desa Adat
			Hutan Adat dan Pengelolaannya
		Hukum Agraria	Konflik dan Sengketa Agraria
			Refedensi Hak-Hak Atas Tanah
			Penataan Tanah Pasca Bencana Alam
			Reforma Agraria (Penataan Aset dan Akses) (Hukum Agraria)
		Hukum Agraria Perairan	Reklamasi Pantai
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
		Tindak Pidana Khusus	Tindak Pidana Keimigrasian
			Pelanggaran HAM Berat
			Tindak Pidana Terorisme
			Tindak Pidana Narkotika
			Tindak Pidana Perdagangan Orang
			Tindak Pidana Penyeludupan Manusia
		Alternative Dispute Resolution (ADR)	Penyelesaian sengketa diluar pengadilan Mediasi, Arbitrase
		Pidana Pajak	Informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dalam laporan pajak & pemerasan atau pengancaman terhadap wajib pajak
		Perkebunan	Membuka atau mengelola lahan
			Kerusakan kebun atau aset lainnya
		Pertahanan dan Keamanan (HI)	Perairan Indonesia dalam Mendukung Perdamaian
			Peran Organisasi Internasional dalam menciptakan kerjasama Internasional
			Cyber Security
			Corruption & Asset recovery
		Pembangunan (HI)	Disaster
		Penataan Lembaga Negara (HTN)	Lembaga-lembaga Negara yang terkait secara langsung dalam pengembangan benua maritim
		Sengketa Pemilu (HTN)	Konsep sengketa Pemilu dan Penyelesaiannya
		Pelayanan Publik (HAN)	Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam



			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Pendekatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas ASN
			Presepsi Masyarakat terhadap Penerapan AUPB di Lingkungan Pemerintah Kab. Asahan
			Tingkat Ketaatan Pejabat Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman
		Kebijakan (HAN)	Kebijakan Hukum Administrasi dalam Pengaturan Tata Ruang
		Negara Hukum Dan Demokrasi	Hukum Sebagai Cermin Tatanan Masyarakat
		Konstitusi	Sengketa Pemilu, undang-undang, Perda, Perbup, Perdes
		Perlindungan Hak Asasi Manusia (HI, H, Dasar)	Hukum sebagai suatu sistem Implementasi Jaminan HAM pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Lingkungan Hidup)
		Aspek hukum penyediaan infrastruktur publik dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia	
		Hukum dan Pembangunan Masyarakat	Penengakan UU
		Hukum Acara Pidana Negara	Efektifitas UU
			Litigasi
			Non Litigasi
3	ISU STRATEGIS: TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Kearifan Lokal	Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum Nasional (Hk, Adat)
		Pluralisme Hukum	Pranata Hukum Adat dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia (Hk, Adat)
		HKI	Ekspresi Budaya Tradisional (Hk, Perdata)
		Hukum Pidana Adat (Hk. Pidana), (Hk. Adat), Hukum Cyber, Hukum Perkebunan	Delik Adat
			Sanksi Delik Adat
			Mekanisme Penyelesaian Delik Adat
			Pidana bullying, penyalahgunaan Media Masa
			Pidana Perkebunan
		Hukum Pidana Perikanan dan kelauatan	Penyelesaian Sengketa Ulayat Laut Hak Ulayat Laut (Hk. Agr/Adat)
			Ko-Manajemen Laut (Hk. Agr)
		HAM (HI)	Indigenous People:



			Perlindungan Terhadap Suku Asli
			<i>Trafficking</i>
		Lingkungan	Perlindungan dan Pencemaran Lingkungan
			<i>Climate Changes</i>
		Konsep Pengelolaan Kewenangan antara Lembaga Negara dan Pemerintahan daerah, pemerintahan desa daerah HTN)	Hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan Benua Maritim
		Konsep Nilai-Nilai Maritim dalam pembentukan perundang-undangan (HTN)	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
		Pelayanan Publik (HTN)	Tingkat Kepatuhan Pejabat terhadap SOP
		Perizinan (HAN)	Sengketa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan
		Negara Hukum dan Demokrasi	Implementasi Prinsip-prinsip Muasyawah Mufakat Berbasis Kearifan Lokal (HK.Dasar)
		Hukum Masyarakat dan Pembangunan	Pluralisme Hukum
		Pengantar Hukum	Peristiwa dan perilaku hukum
		Hukum Acara Tata Usaha Negara	Litigasi
			Non Litigasi
		Imigrasi	Pelayanan Pengurusan Izin Berangkat keluar Negeri



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ASAHAN
Kompleks Fakultas Hukum UNA jalan Ladsitarda No. 1 Kisaran
HP. 0812-6026-5709 Email: fhuna95@gmail.com